

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BIAYA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB) PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF REVENUE TAX COSTS OF VEHICLES (BBNKB) REVENUE DEPARTMENT REGIONAL
OFFICE IN NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Oktofiandry Makaluas¹
Jantje Tinangon²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email: ¹oktomakaluas@gmail.com
²jantjetinangon447@gmail.com

Abstrak: Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis realisasi penerimaan BBNKB pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2011 sampai 2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif untuk mengetahui gambaran penerimaan BBNKB pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian didapatkan bahwa realisasi penerimaan BBNKB mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai 2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai 2015. Sehingga dapat disimpulkan realisasi penerimaan BBNKB mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai 2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai 2015. Penurunan realisasi penerimaan BBNKB disebabkan mulai menjamurnya perusahaan-perusahaan lising yang mengganggu sistem pembayaran pajak dan masih banyaknya wajib pajak yang belum paham terhadap penerapan pajak progresif. Pimpinan Dispenda Provinsi Sulawesi Utara harus terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan baik itu dalam sistem pembayaran pajak ataupun dari sistem yang lain, dan juga dalam hal penetapan target penerimaan pajak harus sesuai dengan teori efektivitas.

Kata kunci: biaya balik nama kendaraan bermotor

Abstract: Cost of vehicle (BBNKB) is one of the tax type that give a high contribution to the revenue of North Sulawesi Province. The purpose of this research to analyzing the citys actual revenues BBNKB at Regional Revenue Department of North Sulawesi Province (Dispenda) the Province of North Sulawesi from 2011 to 2015. The method of analysis that used in this research was quantitative descriptive to know revenue picture BBNKB at office Dispenda Province of North Sulawesi. The results of the study got that the realization of BBNKB increased in 2011 until 2013, and experienced a fall in 2014 to 2015. So that can be concluded the realization of BBNKB increased in 2011 until 2013, and experienced a fall in 2014 to 2015. The decline in the realization of BBNKB caused start the growing number of companies lising that interferences with the payment system taxes and there are still many taxpayers who has not understood against the implementation of progressive tax. Leader of Dispenda Province of North Sulawesi must continue to do innovations in service both in the payment system tax or other systems, and also in the event the order tax revenue target has to be in accordance with the theory the effectiveness.

Keywords: cost of vehicle

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah.

Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan. Dan oleh wajib pajak yang membiayainya tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan memahami bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara. Menurut lembaga pemungutnya, pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 3-8.

Hal tersebut didukung pula dengan berbagai kemudahan yang diberikan dealer dalam pembelian kendaraan bermotor sehingga masyarakat tertarik untuk memilikinya dan selera yang berubah-ubah seiring bergantinya zaman akan mengakibatkan mudahnya terjadi perpindahan kepemilikan suatu kendaraan bermotor dan memicu kepada pengenaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka membiayai pembangunan daerah memiliki beban pembiayaan yang tinggi untuk pemerataan pembangunan untuk dibagikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pajak daerah diperoleh dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis realisasi penerimaan pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Pontoh (2013:1) mendefinisikan akuntansi adalah sebuah system informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan. Sedangkan menurut Reeve (2012:9) akuntansi juga adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Kesimpulan akuntansi disebut sebagai bahasanya dunia usaha karena akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya dan pihak luar yang mengambil keputusan.

Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen

Sodikin dan Riyono (2014:2) menjelaskan akuntansi dapat juga diklasifikasikan berdasar siapa pengguna yang menjadi pusat perhatiannya. Atas dasar fokus ini, akuntansi diklasifikasikan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menyajikan informasi terutama untuk kepentingan pihak eksternal entitas ekonomik. Di antara para pihak eksternal tersebut, pengguna yang utama adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan para kreditor. Akuntansi manajemen menyajikan informasi untuk kepentingan pihak internal entitas ekonomik, yaitu manajemen yang berfungsi mengelola perusahaan.

Akuntansi Pajak

Tunggal (2012:16) menjelaskan bahwa para akuntan yang mengambil spesialisasi dalam bidang ini, haruslah mendalami peraturan perpajakan yang menyangkut perusahaan dimana dia bekerja atau untuk klien yang meminta jasanya dan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku serta keputusan pengadilan yang menyangkut kasus perpajakan.

Pajak

Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2013:1) definisi pajak adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2013:1) adalah:

1. Fungsi budgetair; yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur; yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah

Eryandi (2011:39) menerangkan bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Mardiasmo (2013:12) menyatakan pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Zuraida (2013:21) memberikan beberapa karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Pungutan secara paksa oleh daerah
2. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung; dan
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor

Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perajjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Siahaan, 2013: 209). Menurut Yurida (2012:26), secara umum tujuan dari pembayaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau biasa yang disebut dengan BPKB. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya tindakan preventif dari kepolisian,

Penelitian Terdahulu

Suprianto (2013) dengan penelitian mengenai Analisis bagi hasil penerimaan pajak daerah tingkat I (Provinsi) kepada daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pedapatan Daerah Provinsi NTB dan Untuk membandingkan penerimaan PAD masing-masing Kabupaten dan Kota khususnya yang berhubungan dengan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak cenderung lebih berorientasi pada upaya memaksimalkan koreksi atau temuan pemeriksaan sehingga tujuan lainnya dalam rangka mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat di capai secara efektif. Hal ini terlihat dari tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang justru cenderung mengalami peningkatan.

Pandehotman (2014) dengan penelitian mengenai Analisis trend peramalan efektivitas pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di dispenda prov. Bengkulu tahun 2008-2012, yang bertujuan untuk mengetahui trend efektivitas pendapatan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan BBNKB. Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan metode analisis trend peramalan kuadratik, ini menyatakan bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB akan terus meningkat hingga tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

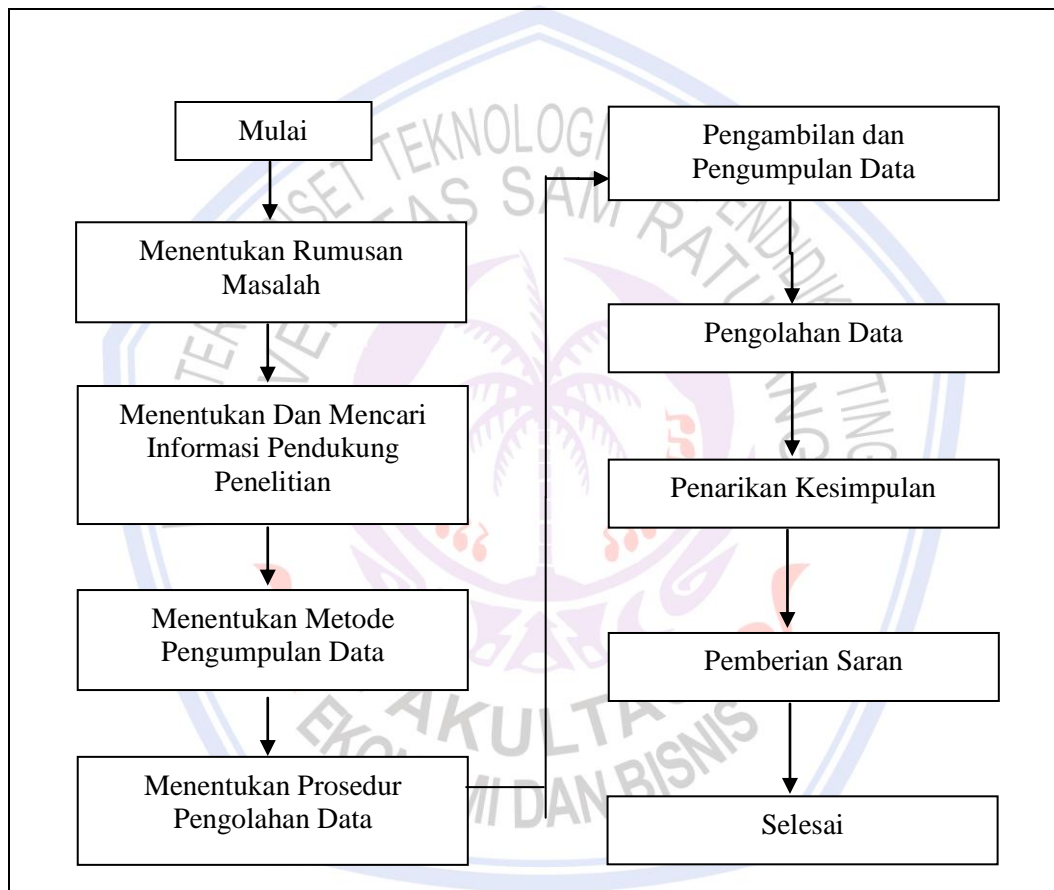
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus No. 67 Manado. Sedangkan waktu penelitian mulai dilaksanakan pada bulan September 2015.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilaksanakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Sumber : Data Hasil Olahan dari Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulut

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu dengan datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, dengan cara bertatap muka langsung dan bertanya pada bagian Pajak di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Sulawesi Utara.
2. Studi Literatur, melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian mulai dari undang-undang perpajakan, undang-undang daerah, peraturan pemerintah, buku-buku, jurnal ilmiah yang telah diterbitkan dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:206) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, dengan menganalisis data realisasi penerimaan BBNKB selama 5 tahun terakhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

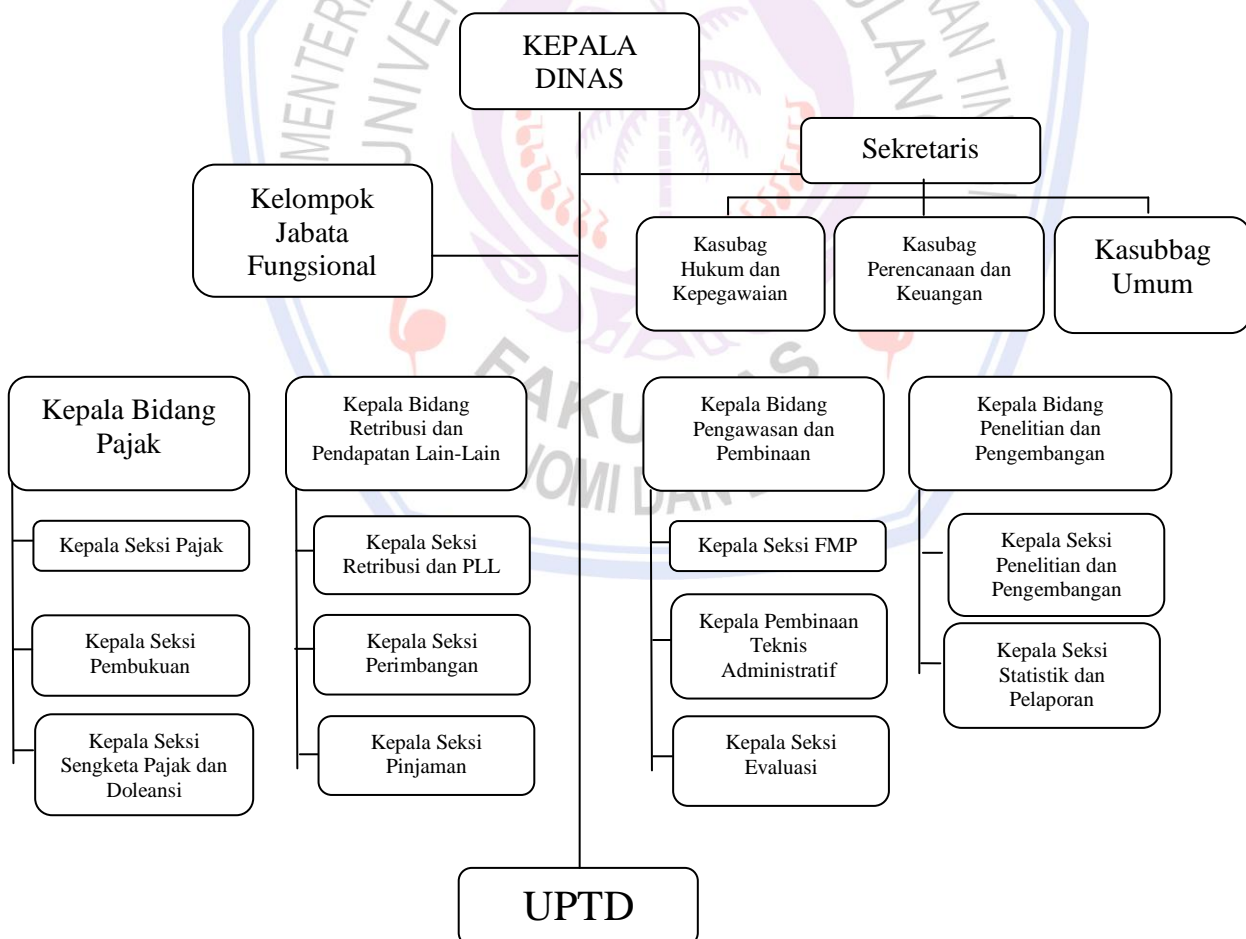
Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Sulawesi Utara adalah instansi yang mempunyai tugas pengkoordinasian pendapatan daerah sekaligus sebagai instansi pelayanan publik atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah di Jalan 17 Agustus No. 67 Manado Kode Pos 95119, Telpn 0431-852861 Faksimili 0431-862815.

Visi dan Misi

1. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima (*excellent service*) terpercaya, transparan dan akuntabel.
3. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berdedikasi, integritas tinggi dan profesional.
4. Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi

Sumber : Data Hasil Olahan dari Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulut

Hasil Penelitian**Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Uraian	Target BBNKB	Realisasi BBNKB
Minimum	208.172.498.750	214.280.095.110
Maksimum	322.210.479.540	299.791.105.950
Rerata	271.472.019.536,00	259.535.279.900,60
Median	283.062.000.950,00	258.208.662.193,00
Deviasi standar	51.661.547.469,27	33.585.567.155,13

Sumber: Data Hasil Olahan dari Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulut

Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum target BBNKB adalah 208.172.498.750 dan nilai minimum realisasi BBNKB adalah 214.280.095.110. Nilai maksimum target BBNKB adalah 322.210.479.540 dan nilai maksimum realisasi BBNKB adalah 299.791.105.950. Nilai rerata target BBNKB adalah 271.472.019.536,00 dan nilai rerata realisasi BBNKB adalah 259.535.279.900,60. Nilai tengah (median) target BBNKB adalah 283.062.000.950,00 dan nilai rerata realisasi BBNKB adalah 258.208.662.193,00. Nilai deviasi standar target BBNKB adalah 51.661.547.469,27 dan nilai deviasi standar realisasi BBNKB adalah 33.585.567.155,13.

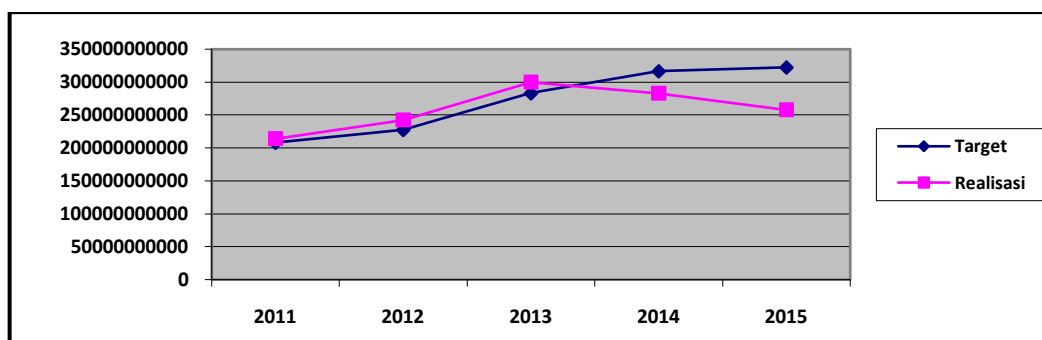
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 2. Pertumbuhan Target dan Realisasi BBNKB Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2011-2015.

Tahun	BBNKB		Pertumbuhan (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2011	208.172.498.750	214.280.095.110	100	102,93
2012	227.462.379.000	242.429.707.500	100	106,58
2013	283.062.000.950	299.791.105.950	100	105,91
2014	316.452.739.440	282.966.828.750	100	89,42
2015	322.210.479.540	258.208.662.193	100	80,14
Jumlah	1.357.360.097.680	1.297.676.399.503	100	95,60

Sumber: Data Hasil Olahan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 2 dapat diketahui bahwa target penerimaan biaya balik nama kendaraan bermotor yang diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp. 1.357.360.097.680,- sedangkan realisasi penerimaan biaya balik nama kendaraan bermotor yang disetorkan ke PAD Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp. 1.297.676.399.503,- atau sebesar 95,60% dari target yang telah ditentukan.

**Gambar 3. Pertumbuhan Target dan Realisasi BBNKB Prov. Sulut Tahun 2011-2015.**

Sumber: Data Hasil Olahan dari Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulut

Gambar 3 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan biaya balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2011-2013. Namun pada tahun 2014-2015, BBNKB mengalami penurunan penerimaan menjadi 80,14%.

Pembahasan

Hasil penelitian diketahui bahwa realisasi penerimaan biaya balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Namun meskipun biaya balik nama mengalami penurunan realisasi penerimaan dua tahun terakhir, BBNKB tetap menjadi sumber pendapatan terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara yakni sebesar 32,77%.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2013) yang dilakukan di Dispenda Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa biaya balik nama kendaraan bermotor memiliki kontribusi positif dan sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor terhadap pendataan asli daerah selama tahun 2009-2012 rata-rata 71,35%.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2014) yang dilakukan di Dispenda Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa tingkat pertumbuhan biaya balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2007-2012 adalah sebesar 19,27%. Biaya balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup bagi PAD Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat efektivitas pemungutan yang sangat efektif yaitu sebesar 116,31%.

Kesamaan lainnya dalam penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu adalah terdapat masa dimana realisasi penerimaan biaya balik nama kendaraan bermotor menurun. Dalam penelitian ini realisasi penerimaan BBNKB menurun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pandehotman (2014) di Dispenda Provinsi Bengkulu, penurunan realisasi penerimaan BBNKB disebabkan karena faktor dari luar dinas. Hal ini dikarenakan mulai menjamurnya perusahaan-perusahaan lising yang mengganggu sistem pembayaran pajak di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2014) di Dispenda Wilayah Kota Bandung III, penyebab menurunnya penerimaan BBNKB adalah karena masih banyak wajib pajak yang belum paham terhadap penerapan pajak progresif. Jadi wajib pajak yang telah menjual kendaraannya tidak melaporkan kepada pihak Samsat untuk dilakukan pemblokiran nomor polisi kendaraannya, sehingga wajib pajak tersebut dikenai tariff progresif dengan demikian pembeli kendaraan bekas membayar pajak kendaraan yang telah dibelinya sehingga penerimaan BBNKB meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan peneliti ini adalah :

1. Realisasi penerimaan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai dengan 2015.
2. Penurunan realisasi penerimaan pajak BBNKB disebabkan karena mulai menjamurnya perusahaan-perusahaan lising yang mengganggu sistem pembayaran pajak dan masih banyaknya wajib pajak yang belum paham terhadap penerapan pajak progresif.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Pihak Dispenda Provinsi Sulawesi Utara harus terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan baik itu dalam sistem pembayaran pajak ataupun dari sistem yang lain, dan juga dalam hal penetapan target penerimaan pajak harus sesuai dengan teori efektivitas.
2. Bagi peneliti lainnya

Dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, diharapkan ada penelitian lanjutan yang serupa di masa yang akan datang untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan tersebut. Untuk itu penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

- a. Menambahkan lebih dari satu objek penelitian seperti Kantor Dispenda Manado dan Kantor Dispenda Bitung.
- b. Menambah variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dll.
- c. Menambah variabel dependen dan independen dalam penelitian agar dapat dilakukan uji statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, F. 2014. Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (Studi Kasus Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah provinsi Wilayah Kota Bandung III). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4509>. Di akses 20 mei 2016. Hal 1-25.
- Eryandi, G. 2011. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. <http://repository.unib.ac.id/7029/1/Efektifitas.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiJ7PezY4nNAhVEjZQKHbjNCjAQFggTMAA&sig2=lotbsBOQoxYkXnPCRv3rgQ&usg=AFQjCNE6q2-yTpHcmGZ0VEJFn29JS2RDEw>. Diakses 20 mei 2016. Hal 37-44.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Edisi Ketiga Belas. Andi, Yogyakarta.
- Mustika, Sari Tri. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bemotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. http://eprints.dinus.ac.id/8635/1/jurnal_12573.pdf. Diakses 20 Juni 2015. Hal 1-12.
- Natalia, K. 2014. Analisis Kontribusi, Efektivitas Pemungutan, dan Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. <http://repository.unand.ac.id/21662/>. Diakses 20 mei 2016. Hal 1-12.
- Pontoh, W. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta.
- Pandehotman, H. 2014. Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2012. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu. <http://www.google.co.id/url?url=http://jurnal.uniwed.ac.id/index.php/er/article/download/159/150&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwid5au31onNAhWKn5QKHRCYBD4QFgggMAI&sig2=1vtJeoV7IGeNbwjrjBRNXfw&usg=AFQjCNEMYw85fJDPigM0QXapScRiMw2DYw>. Diakses 20 mei 2016. Hal 1-12.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2011. *Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Pajak Daerah*. Manado
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta
- Reeve. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.

- Siahaan. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Sodikin, S. S. dan B. A. Riyono. 2014. *Akuntansi Pengantar I Edisi Kesembilan*. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuhbelas. Alfabeta, Bandung.
- Suprianto. 2013. Analisis Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) Kepada Daerah Kabupaten/Kota DI Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal*. Universitas Mataram. http://www.google.com/url?url=http://jurnal.unram.ac.id/index.php/distribusi/article/download/139/94&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj7p_k5InNAhUKFZQKHcAEAHwQFggUMAA&sig2=dlGIy9gsGg1Uiq9XB0AAyw&usg=AFQjCNHMZIEVWWijkrwXqgNp71QwKQh5g. Diakses 20 mei 2016. Hal 1-25.
- Tunggal A. W. 2012. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Harvarindo, Jakarta.
- Yurida, P. 2012. Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas Di DKI Jakarta. *Skripsi*. Universitas Indonesia. <http://www.google.com/url?url=http://lib.ui.ac.id/file%3Ffile%3Ddigital/20320492-S-Pheni%2520Yurida.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjS9OOs5onNAhXKI5QKHfWuD3EQFggWMAA&sig2=RkhjRw2WvzaIXEjyWjPQQ&usg=AFQjCNEpPie-SZAaJW58YlsLOyBeJa5-Dg>. Diakses 20 mei 2016. Hal 1-10.
- Zuraida Idah, 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.

